



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Reaksi Jepang Dalam Menghadapi Ancaman Misil Korea**  
**Utara Tahun 2012 - 2017**

Skripsi

Oleh

Panji Adi Putra

2013330181

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Panji Adi Putra  
Nomor Pokok : 2013330181  
Judul : Reaksi Jepang Dalam Menghadapi Ancaman Misil Korea Utara

Menyetujui untuk diajukan pada  
Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Bandung, 14 Agustus 2018

Pembimbing,

**Idil Syawfi, S.IP, M.Si.**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**Sylvia Yazid, S.IP, Ph.D**



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Reaksi Jepang Dalam Menghadapi Ancaman Misil Korea  
Utara Pada Tahun 2012 - 2017**

Skripsi

Oleh

Panji Adi Putra

2013330181

Pembimbing

Idil Syawfi

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Panji Adi Putra  
Nomor Pokok : 2013330181  
Judul : Reaksi Jepang Dalam Menghadapi Ancaman Misil Korea Utara Pada Tahun 2012 - 2017

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 13 September 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

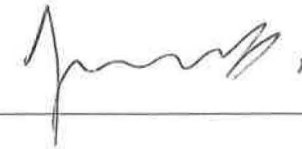
**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap anggota**  
Dr. I Nyoman Sudira, Drs, M.Si.

: 

**Sekretaris**  
Idil Sywafi, S.IP, M.Si.

: 

**Anggota**  
Adrianus Harsawaskita, S.IP, MA.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Panji Adi Putra

NPM : 2013330181

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Penelitian : Reaksi Jepang Dalam Menghadapi Ancaman Misil Korea Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Agustus 2018



Panji Adi Putra

## ABSTRAK

Nama : Panji Adi Putra  
NPM : 2013330181  
Judul : Reaksi Jepang Dalam Menghadapi Ancaman Misil Korea Utara

---

Penelitian ini akan memfokuskan tentang adanya peningkatan ancaman misil Korea Utara terhadap reaksi Jepang. Selain itu, adanya penurunan komitmen Amerika Serikat dalam menjaga keamanan Jepang serta posisinya sebagai aliansi Jepang pun akan memberikan dampak terhadap pembentukan kebijakan dan pertahanan Jepang.

Peneliti menggunakan teori *neorealism*, teori *offensive neorealism* serta teori *alliance dilemma*. Pertama, teori *neorealism* menjelaskan bahwa sistem yang berlaku dalam dunia internasional adalah sistem anarkis dan adanya *balance of power* untuk membuat negara akan menjaga sistem yang telah ada. Kedua, teori *offensive neorealism* menyatakan bahwa negara akan cenderung memaksimalkan kekuatan militernya untuk menjadi negara hegemon dan akan melakukan *self - help* untuk melindungi keberlangsungan hidup negaranya dan adanya *security dilemma* yang disebabkan oleh negara tidak akan pernah mengetahui intensi dari negara lain. Ketiga, Teori *alliance dilemma* akan mendeskripsikan bahwa pada suatu aliansi negara yang buruk, salah satu dari negara tersebut akan melakukan *buck - passing* dan akan memanfaatkan negara aliansinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan hubungan antara teori dan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan ancaman misil Korea Utara dan berkurangnya komitmen Amerika Serikat untuk turut berpartisipasi dalam menghadapi Korea Utara, sehingga menuntut Jepang untuk dapat beradaptasi dalam situasi yang baru.

Kata Kunci: Misil Korea Utara, Jepang, Amerika Serikat, *neorealism*, *offensive neorealism*, *alliance dilemma*, *balance of power*, *self – help*, *security dilemma*, *buck – passing*.

## **ABSTRACT**

Name : Panji Adi Putra  
NPM : 2013330181  
Title : Japan Reaction Against North Korea Missiles

---

*This research focused on the Japan Reaction against the threat of the North Korean's missiles. Beside that, The United States of America lowered their commitment to defend the security of Japan and their position as the ally of Japan will make an impact for the policy making and the security of Japan.*

*Author used neorealism theory, offensive neorealism theory and alliance dilemma theory. First, neorealism explained that the anarchy system is the only system that exist in this international community and there's a balance of power that will make states to defend the current working system. Second, offensive neorealism stated that states will maximize their own military to become the super power, states will also do a self – help to protect their own survival, and there's a security dilemma caused by states never certain about other states intentions about them. Third, alliance dilemma theory described that in a bad alliance, one of the states will do a buck – passing and make the other states to do biddings.*

*This research will use a qualitative method to describe the relations between the theory and research. This research concluded that there's an increasing missiles threat of North Korean's and the decreasing commitment of United States commitment to participate in the conflict with North Korea which forcefully make Japan to adapt in a new situation.*

*Keywords: North Korean's missiles, Japan, United States of America, neorealism, offensive neorealism, alliance dilemma, balance of power, self – help, security dilemma, buck – passing.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkatnya dan segala kesempatannya yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Reaksi Jepang Dalam Menghadapi Ancaman Misil Korea Utara”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi kriteria dan persyaratan kelulusan dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan tugas akhir ini hingga selesai.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembacanya, dapat menambah ilmu serta pemahaman terkait isu yang terkait. Namun, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih tidak sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap apabila ada kekurangan yang ada dapat disampaikan melalui kritik dan saran. Hal tersebut tentu akan menjadi pengembangan dari penelitian ini dan akan lebih berguna di masa yang akan datang.

Bandung, 14 Agustus 2018

Peneliti



## Daftar Isi

<b>ABSTRAK</b> .....	2
<b>ABSTRACT</b> .....	3
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	4
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	8
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	8
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	8
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN</b> .....	9
<b>BAB I</b> .....	11
<b>PENDAHULUAN</b> .....	11
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	11
<b>1.2. Identifikasi Masalah</b> .....	16
<b>1.2.1 Pembatasan Masalah</b> .....	19
<b>1.2.2. Perumusan Masalah</b> .....	20
<b>1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	20
<b>1.3.1. Tujuan Penelitian</b> .....	20
<b>1.3.2. Kegunaan Penelitian</b> .....	20
<b>1.4. Kajian Literatur</b> .....	21
<b>1.5. Kerangka Pemikiran</b> .....	22
<b>1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data</b> .....	31
<b>1.6.1. Metode Penelitian</b> .....	31
<b>1.6.2. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	31
<b>1.7. Sistematika Penulisan</b> .....	31
<b>Bab II</b> .....	33
<b>The Basic of Japanese Security Policy</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2.1 Kebijakan Utama Jepang</b> .....	35
<b>2.1.1 Artikel 9 Konstitusi Jepang</b> .....	35
<b>2.1.2 Perjanjian San Francisco</b> .....	36

2.1.3 U.S.- Japanese Security Treaty .....	37
2.1.4 Doktrin Yoshida dan Doktrin Shinzo Abe.....	38
2.2 Kerja Sama Jepang dan Amerika Serikat .....	40
2.2.1 Pentingnya aliansi Jepang dan Amerika Serikat .....	40
2.2.2 Keuntungan dan Tantangan dalam kerja sama Jepang dan Amerika Serikat .....	42
2.3 Ancaman Korea utara .....	45
2.3.1 Ancaman misil Korea Utara .....	45
2.3.2 Penculikan dan Penyelundupan Korea Utara.....	47
2.4 Tindakan Jepang Dalam Menghadapi Korea Utara .....	48
2.4.1 Ballistic Missile Defence .....	48
2.4.2 Sanksi Terhadap Korea Utara.....	50
2.4.3 Remiliterisasi dan Latihan Militer Jepang .....	52
<b>Bab III</b> .....	54
<b>Sistem Jepang Dalam Menghadapi Korea Utara</b> .....	54
3.1 Peningkatan Ancaman Misil Korea Utara .....	55
3.1 Timeline Peningkatan Percobaan Misil Korea Utara.....	55
3.1.2 Daftar Misil Kepemilikan Korea Utara .....	57
3.1.3 Enrichment Program .....	59
3.1.3 Lokasi tambang dan Penelitian Uranium Korea Utara .....	59
3.1.4 List Misil Korea Utara Yang Melewati Jepang.....	62
3.2 Dilema Jepang dan Amerika Serikat Dalam Menghadapi Korea Utara .....	67
3.3 Reaksi Jepang.....	74
3.3.1 Perubahan Doktrin Jepang .....	74
3.3.2 Perubahan Sistem Pertahanan Jepang .....	76
3.3.2 Collective Self – Defence of Japan .....	78
3.3.3 Grafik Perubahan Anggaran Pertahanan Jepang .....	79
3.3.4 Grafik Perubahan Persentase Dana Militer Terhadap GDP.....	80
3.3.5 Diagram Pengeluaran Biaya Militer .....	81

<b>3.3.4 Konsep Utama Jepang Dalam Keamanan dan Pertahanan Mengenai Korea Utara.....</b>	<b>82</b>
<b>Bab IV .....</b>	<b>85</b>
<b>Kesimpulan.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 – Ancaman Misil Korea Utara (Sumber: North Korea’s Missile Tests, CNN).....	47
Gambar 2.2 – Korban Penculikan Korea Utara (Sumber: North Korea Abductions, Ministry of Foreign Affairs).....	49
Gambar 2.3 – Pertahanan Rudal Balistik (Sumber: Ballistic Missile Defense, Ministry of Defence).....	51
Gambar 3.1 – Tambang Uranium di Korea Utara (Sumber: Uranium Mine in North Korea, Google Earth) .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 – Karakteristik Desain Rudal Balistik Korea Utara (Sumber: Design Characteristics of North Korea’s Ballistic Missiles, NTI).....	58
Tabel 3.2 – Daftar Rudal Korea Utara yang melewati negara Jepang .....	63

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 – Tes Rudal Keluarga Kim (Sumber: North Korea’s Missile Threat, CNN).....	56
Diagram 3.2 – Matriks Legislasi untuk Kedamaian dan Keamanan (Sumber: Japan’s Legislation for Peace and Security, Kantei).....	79
Diagram 3.3 – Anggaran Pertahanan Jepang 2012-2017 (Sumber: Chapter Asia: Japan, The Military Balance) .....	80
Diagram 3.3 – Persentase Dana terhadap GDP 2012 - 2017 (Sumber: Chapter Asia: Japan, The Military Balance) .....	81
Diagram 3.4 – Perubahan Pengeluaran Biaya Pertahanan (Sumber: Defence and Budget of Japan, Ministry of Defence).....	82

## **DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN**

ABMD	: Aegis Ballistic Missile Defence
BMD	: Ballistic Missile Defence
FDI	: Foreign Direct Investment
IAEA	: Internatioal Atomic Energy Agency
ICBM	: Intercontinental Ballistic Missile
IRBM	: Intermediate Range Ballistic Missile
JADGE	: Japan Aerospace Defence Ground Environment
JDR	: Japan Disaster Relief
JSDF	: Japanese Self Defence Force
MRBM	: Medium Range Ballistic Missile
NDP	: National Defence Program
NDPG	: National Defence Program Guidelines
PAC – 3	: Patriot Advanced Capability – 3
PKO	: Peace Keeping Operation
RPN	: Regional Production Networks

SCAP : Supreme Commander for the Allied Powers

SDF : Self Defence Force

SRBM : Short Range Ballistic Missile

THAAD : Terminal High Altitude Area Defence

TNNPT : The Non Nuclear Proliferation Treaty

UN : United Nations

USSR : Union of Soviet Socialist Republics

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Militer merupakan simbol kekuatan dari sebuah negara dan berfungsi sebagai alat negara untuk melindungi dan memenuhi keinginan negara tersebut dalam bentuk militerisme di dunia Internasional ini, dan hampir seluruh negara memiliki militer yang utuh dan cukup kuat untuk melindungi negara mereka sendiri dari ancaman - ancaman negara lain. Akan tetapi, militer milik Jepang yang bernama JSDF (*Japanese self defence force*) di sisi lain tidak memiliki persenjataan militer agresif yang utuh seperti negara - negara besar lainnya seperti bomber, rudal, dan kapal induk<sup>1</sup>.

Hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian San Francisco antara Jepang dan Amerika pada akhir perang dunia ke 2 yang dimana saat itu Jepang adalah negara superpower di Asia Timur yang bersifat agresif dan memiliki aliansi dengan Jerman dan Italia (Axis), yang berakhir dengan kekalahan Axis kepada Sekutu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ministry of Defence, "Defense of Japan". Diakses pada tanggal 26 Agustus 2017.  
<http://www.mod.go.jp/>

<sup>2</sup> "Treaty of San Francisco". 1952, United Nations Treaty Series, Diakses melalui  
<https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20136/volume-136-i-1832-english.pdf>

Selain Perjanjian San Francisco, adanya *Japan - U.S Security Treaty* yang akan memberikan akses militer kepada Amerika Serikat untuk mengawasi militer Jepang dan juga memperbolehkan untuk membangun pangkalan militernya yang berada di Okinawa dan Guam. Hal ini dilakukan Amerika Serikat untuk dapat mempertahankan keamanan Asia Timur terutama negara Jepang, dan memberikan dampak yang membuat keterbatasan dan ketergantungan akan kemajuan militer dari pihak Jepang yang dibatasi dan dipantau oleh pihak Amerika Serikat<sup>3</sup>. Selain itu, adanya Artikel 9 dalam Konstitusi Jepang yang menyebutkan bahwa Jepang tidak akan mendukung segala aksi peperangan dan tidak akan memiliki persenjataan militer yang dapat mengancam keamanan negara lain, membuat Jepang menjadi negara pasifis<sup>4</sup>. Oleh karena itu, Jepang menggunakan doktrin Yoshida yang memfokuskan kepada sektor ekonomi dan bergantung kepada Amerika Serikat<sup>5</sup>.

Namun, ancaman - ancaman dari negara seperti China dengan kekuatan ekonomi dan militernya yang terus berkembang secara pesat dan juga Korea Utara yang kerap melakukan uji coba nuklir pun semakin membuat Jepang terdesak dan hanya bisa meminta pertolongan kepada Amerika Serikat dan Organisasi Internasional. Langkah yang diambil Jepang untuk bisa mengatasi

---

<sup>3</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Japan-U.S. Security Treaty".

Diakses pada tanggal 30 Maret 2018. <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html>

<sup>4</sup> Prime Minister of Japan and His Cabinet, "The Constitution of Japan". Diakses pada tanggal 30 Maret 2018. [http://japan.kantei.go.jp/constitution\\_and\\_government\\_of\\_japan/constitution\\_e.html](http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html)

<sup>5</sup> University of Pittsburgh, "Yoshida Doctrine". Diakses pada tanggal 30 Maret 2018. <http://www.japanpitt.pitt.edu/glossary/yoshida-doctrine>



ancaman tersebut sangatlah terbatas.<sup>6</sup> Karena, selama Artikel 9 dalam Konstitusi Jepang masih berjalan dan tidak berubah, Jepang akan tetap menjadi negara pasifis yang memiliki militer tidak utuh, ketertinggalan teknologi militer, dan pengalaman militer, sedangkan hal tersebut adalah sesuatu yang diperlukan JSDF di saat ini, yang juga dikelilingi oleh negara tetangga yang memiliki pengalaman buruk pada masa kolonial. Oleh karena itu, kemajuan dari Militer Jepang sangatlah penting untuk menjaga keamanan nasionalnya terutama dengan adanya krisis nuklir dan misil dari Korea Utara.

Sedangkan, hubungan antara Jepang dan Korea Utara memang sudah buruk sejak awalnya berdirinya Korea Utara pada tahun 1950 an, di latar belakang oleh adanya kolonialisme yang dilakukan Jepang membuat hubungan diplomatik antar ke 2 semakin sulit. Hubungan ke 2 negara tersebut diperburuk dengan adanya aksi penculikan dari Korea Utara terhadap Jepang dan ditambah dengan dugaan atas Korea Utara yang memberikan perlindungan terhadap Tentara Merah Jepang yang dianggap sebagai kelompok teroris, dan adanya penyelundupan narkoba, perburuan laut, pengintaian dan juga ketidakmampuan Korea Utara untuk membayar hutang kepada para pedagang dan pengusaha Jepang membuat hubungan ke 2 negara semakin buruk<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Declan Hayes (2013). *The Toothless Tiger*. Chapter five: Japan The Toothless Tiger, page 122.

<sup>7</sup> Mark E. Manyin (2003). *Japan-North Korea Relations: Selected Issues*, page 4.

Lalu pada tahun 1984, pihak Korea Utara melakukan penelitian akan nuklir dan misil, hal ini dilakukan sebagai upaya dari Korea Utara untuk mengembangkan teknologi militernya dan melakukan intimidasi terhadap lawannya, tindakan ini kerap dilakukan hingga tahun 2017 dengan perkiraan uji coba yang lebih dari 30 kali, dan pernah melakukan uji coba untuk meluncurkan misil yang bernama Taepodong-1 pada tahun 1998.<sup>8</sup>

Taepodong merupakan jenis misil *intermediate-range missile*. Tindakan ini dianggap sebagai ancaman bagi Jepang karena tidak adanya pemberitahuan akan adanya peluncuran misil tersebut yang akan melintasi wilayah Jepang. Menanggapi hal tersebut, hal yang dilakukan oleh JSDF adalah dengan membuat pertahanan bersama Amerika Serikat yang bernama BMD (*Balistic Missile Defence*) dan memberikan alat pertahanan yang bernama PAC - 3 (*Patriot Advanced Capability*) berfungsi sebagai alat pertahanan yang akan melindungi teritorial Jepang dari serangan udara seperti misil. Selain PAC - 3, JSDF pun menggunakan sistem pertahanan yang bernama ABMD (*Aegis Ballistic Missile Defence System*), ABMD adalah sistem pertahanan berbasis Maritim yang memberikan teknologi untuk mendeteksi dan menembak misil yang masuk dalam jangkauan pada kapal yang diberikan ABMD.

---

<sup>8</sup> Sam Kim. "A Timeline of North Korea's Missile Launches and Nuclear Detonations". Diakses pada tanggal 29 Agustus 2017. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-16/north-korea-missile-launches-nuclear-detonations-timeline>

Namun, uji coba misil terus dilakukan oleh Korea Utara hingga tahun 2017 dan diperkirakan ada 5 uji coba misil yang melewati wilayah Jepang, walaupun Korea Utara melakukan adanya pemberitahuan untuk melakukan uji coba tersebut kepada pihak Jepang setelah tahun 1998, hal tersebut dianggap sebagai aksi provokasi terhadap negara tetangga dan pelanggaran atas perjanjian UN.<sup>9</sup> Lalu pada tanggal 29 Agustus 2017, Korea Utara meluncurkan misil balistik yang bernama Hwasong-12, misil tersebut melintasi Hokkaido dan menuju ke laut pasifik.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Jepang hanya bisa meminta bantuan kepada Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh Donald Trump untuk memberikan tekanan yang lebih terhadap Korea Utara. Berbeda dengan ancaman dari China, Korea Utara merupakan negara yang tidak stabil dalam segala aspek dan cenderung sulit ditebak. Menanggapi hal tersebut, Jepang diharapkan bisa meluncurkan taktik - taktik diplomasi dan militernya untuk melancarkan adanya kebangkitan militer dari Jepang, sehingga tidak perlu adanya ketergantungan kepada Amerika Serikat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Washington Post, "North Korean missile flies over Japan, escalating tensions and prompting an angry response from Tokyo". Diakses pada tanggal 29 Agustus 2017.  
[https://www.washingtonpost.com/world/north-korean-missile-flies-over-japan-escalating-tensions-and-prompting-an-angry-response-from-tokyo/2017/08/28/e1975804-8c37-11e7-9c53-6a169beb0953\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/north-korean-missile-flies-over-japan-escalating-tensions-and-prompting-an-angry-response-from-tokyo/2017/08/28/e1975804-8c37-11e7-9c53-6a169beb0953_story.html)

<sup>10</sup> Declan Hayes (2013). The Toothless Tiger. Chapter two: The Dagger to The Heart: Korea, page 51.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Setelah berakhirnya perang korea yang menghasilkan Korea Utara dan Korea Selatan, Korea Utara tetap menjadi salah satu ancaman bagi Jepang dengan adanya peajajahan yang telah dilakukan Jepang dan adanya perbedaan ideologi diantara kedua negara. Hubungan antara kedua negara diperburuk dengan adanya aksi penculikan dan penyelundupan yang dilakukan Korea Utara terhadap Jepang dan adanya aksi percobaan misil yang telah dilakukan Korea Utara pada tahun 1998 hingga saat ini.<sup>11</sup>

Ancaman misil Korea Utara kepada Jepang bermula pada tahun 1998 saat misil Taepodong-1 diluncurkan. Namun, ancaman yang sebenarnya berada pada misil yang bernama Nodong, Nodong merupakan misil berjarak dekat yang dimiliki Korea Utara, penggunaan nodong diperkirakan sebagai bentuk ancaman bagi Jepang dan Amerika Serikat dan menjadi salah satu faktor utama bagi JSDF untuk berpartisipasi di BMD (*Ballistic Missile Defence*).<sup>12</sup> Penggunaan BMD sangatlah penting bagi Jepang untuk mempertahankan keamanan negara dan memberikan keuntungan militer bagi JSDF, dan sistem BMD akan sangat memperkuat garis pertahanan militer JSDF untuk bisa menghadapi ancaman misil dari Korea Utara. Selain memperkuat JSDF, sistem

---

<sup>11</sup> Ministry of Foreign Affairs, "*Japan-North Korea Relations*". Diakses pada tanggal 31 Maret 2018. [http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n\\_korea/index.html](http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/index.html)

<sup>12</sup> Swaine, Michael D. Swanger, Rachel M. Kawakami, Takashi (2001). *Japan and Ballistic Missile Defense*, page ix.

BMD juga akan meningkatkan kerjasama militer antara Jepang dan Amerika Serikat serta dapat memberikan pertahanan lebih untuk militer Amerika Serikat yang berada di Okinawa dan juga Guam.<sup>13</sup>

Pada tahun 2007, JSDF berhasil mengimplementasikan sistem pertahanan berlapis untuk dapat menghadapi serangan misil balistik yang terdiri dari unit ABMD (*Aegis Ballistic Missile Defence*) dan PAC-3 (*Patriot Advanced Capability*) yang di koordinasi oleh JADGE (*Japan Aerospace Defence Ground Environment*), sebagai bentuk untuk mengantisipasi ancaman misil Korea Utara. ABMD merupakan teknologi pertahanan misil yang berupa sistem keamanan radar yang dipasang di kapal untuk mendeteksi dan menembak jatuh misil yang masuk pada jangkauan, Jepang pada tahun 2017 diperkirakan memiliki sebanyak 27 kapal yang dilengkapi oleh ABMD, dan juga PAC-3 sebagai bentuk pertahanan misil yang berada di darat dan diperkirakan memiliki sebanyak 60 PAC-3 di daratan Jepang saat ini.<sup>14</sup>

Pada tahun 2012, Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong Un telah memperbanyak dan meningkatkan percobaan misilnya dan adanya misil yang melewati wilayah Jepang. Hal tersebut tentu memberikan ancaman terhadap keamanan Jepang. Sehingga Jepang membutuhkan peranan militer

---

<sup>13</sup> Ibid. page 4

<sup>14</sup> Ministry of Defence, "Japan's BMD". Diakses pada tanggal 1 September 2017.  
[http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/bmd/bmd.pdf](http://www.mod.go.jp/e/d_act/bmd/bmd.pdf)

Amerika Serikat dalam menghadapi hal tersebut. Amerika Serikat adalah satu - satunya harapan bagi Jepang dalam menghadapi ancaman Misil dari Korea Utara, hubungan bilateral antara ke 2 negara sangat berpengaruh bagi pertahanan negara Jepang dan dapat memberikan dukungan teknologi militer dari Amerika Serikat. Jepang pun merupakan salah satu negara yang menjadi tumpuan bagi Amerika Serikat untuk bisa mempertahankan posisinya dan untuk menjaga kestabilan politik di kawasan Asia Timur, karena pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Okinawa dan Guam merupakan lokasi yang sangat strategis dalam kawasan ini, hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi Amerika Serikat untuk berkontribusi dan melindungi keamanan Jepang.<sup>15</sup>

Terlihat dari penjelasan diatas bahwa keamanan nasional Jepang masih terancam dengan keberadaan misil dari Korea Utara. Bantuan politik, teknologi serta militer dari Amerika Serikat masih menjadi tumpuan utama bagi Jepang untuk bisa menghadapi ancaman dari Korea Utara. Oleh karena itu, Jepang diharapkan bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan akses militer yang lebih untuk dapat menjaga keamanan nasionalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jepang belum bisa dikatakan aman dari ancaman misil Korea Utara. Yang menjadi fokus utama penulis adalah bagaimana langkah - langkah militer dan politik Jepang untuk bisa menghadapi ancaman tersebut.

---

<sup>15</sup> Swaine, Op. Cit, page 19.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Ancaman misil dari Korea Utara kepada Jepang bermula pada saat tahun 1998 dimana Korea Utara meluncurkan Taepodong-1. Oleh karena itu, Jepang membutuhkan sistem pertahanan dan teknologi militer untuk bisa menghadapi ancaman tersebut, maka campur tangan dan bantuan dari Amerika Serikat pun sangatlah dibutuhkan oleh Jepang. Namun, ancaman tersebut semakin meningkat dengan adanya kepemimpinan Korea Utara oleh Kim Jong Un pada tahun 2012 hingga saat ini.

Selain itu, dengan melihat situasi politik dan militer seperti ini, Jepang seharusnya bisa memanfaatkan keadaan tersebut untuk bisa merubah sistem militer Jepang dari JSDF (*Japanese Self Defence Force*) yang bersifat pasifis. Situasi ini akan menarik perhatian negara - negara lain, oleh karena itu penulis berpendapat bahwa Jepang seharusnya melakukan tindakan tersebut melihat dengan adanya potensi untuk merubah sistem kebijakan Jepang.

Sehingga, penelitian ini berfokuskan kepada langkah - langkah politik militer Jepang pada tahun 2012-2017, disaat Jepang merubah sistem militer mereka untuk bisa menjaga kedaulatan negara dari ancaman – ancaman Korea Utara, terutama dalam menghadapi krisis misil Korea Utara, dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Pertanyaan yang akan muncul dan dijawab oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai **“Bagaimana Reaksi Jepang Dalam Menghadapi Misil Korea Utara?”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas dari kondisi politik dan militer Jepang yang kompleks dan diikuti dengan adanya ancaman dari negara Korea Utara. Dalam penelitian ini akan diteliti juga ancaman misil dari Korea Utara dan ketergantungan sistem militer Jepang kepada Amerika Serikat untuk menghadapi krisis misil oleh Korea Utara.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan tambahan dan membuka titik terang bagi studi kawasan Asia Timur dan Kajian Strategis, khususnya Jepang. Hasil penelitian yang akan dicapai diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian bagi penstudi hubungan Internasional khususnya bagi yang meneliti keamanan Jepang terutama dalam menghadapi ancaman misil Korea Utara.



#### 1.4. Kajian Literatur

Peneliti menggunakan kajian literatur atau referensi sebagai sumber untuk dapat membantu dan mendukung validnya penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan dua literatur yang berupa buku sebagai referensi penulis dalam penelitian mengenai meningkatnya ancaman misil Korea Utara terhadap keamanan Jepang.

Kajian literatur yang pertama adalah buku berjudul *Japan the Toothless Tiger* (2013) yang ditulis oleh Declan Hayes. Dalam bukunya Declan Hayes menggambarkan kondisi Jepang yang tersudutkan oleh negara - negara seperti China dan Korea Utara dan ketergantungannya akan Amerika Serikat. Buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana ancaman dari China yang memperkuat dan memperluas kekuasaannya dalam bidang ekonomi, militer yang akan mengancam Jepang.

Kajian literatur yang kedua adalah *Japan ad Ballistic Missile Defence* (2001) yang ditulis oleh Michael D. Swaine. Buku ini menjelaskan tentang adanya perkembangan ancaman misil di kawasan Asia Timur terutama ancaman dari Korea Utara, dan juga adanya peranan Amerika Serikat untuk melakukan kerjasama dengan Jepang untuk mengembangkan teknologi *Anti Ballistic Missile* pada tahun 1998. Selain itu, buku ini pun menjelaskan penulis tentang pergerakan dan motif Jepang untuk berkontribusi di *Ballistic Missile Defence* (BMD) dan adanya keuntungan serta permasalahan kebijakan dan keputusan Jepang dalam BMD yang berpengaruh pada kerjasama antar Jepang dan Amerika Serikat.

Kajian literatur yang ketiga adalah *The Tragedy of Great Power Politics* (2001) yang ditulis oleh John J. Mearsheimer. Buku ini merupakan landasan teori bagi *offensive neorealism*, Mearsheimer memiliki pendapat bahwa setiap negara akan cenderung untuk memaksimalkan kekuatan militernya untuk menjadi negara hegemon di suatu kawasan untuk dapat mempertahankan keberlangsungan negaranya.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

*Power* merupakan salah satu elemen terpenting dalam suatu negara dan kata *power* tidak akan pernah terlepas dari studi hubungan internasional dan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hubungan internasional pun memiliki sistem tersendiri dalam berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, negara akan melakukan apapun untuk tetap bisa bertahan dan menjaga *power* negara tersebut untuk bisa menjaga kedaulatan mereka dalam sistem yang berada di hubungan internasional ini, sedangkan yang dimaksud *power* adalah hal yang berkaitan dengan politik, militer, ekonomi suatu negara. Dalam menganalisis sistem yang berada di hubungan internasional ini, Kenneth N. Waltz beranggapan bahwa sistem yang berlaku adalah *anarchy*, yang dimana tidak ada pihak yang berwenang dalam dunia internasional untuk menjaga kestabilan dan keamanan di hubungan internasional, hal ini disebabkan oleh karena setiap negara memiliki sifat dan hak yang sama.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kenneth N. Waltz (1979). "Theory of International Politics". *Anarchic Structures and Balances of Power*. page 103

Kenneth N. Waltz pun menilai bahwa setiap negara memiliki sistem *self-help* dan negara akan khawatir dengan *survivability* nya, oleh karena itu setiap negara akan berusaha sendiri tanpa adanya campur tangan negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan negara tersebut. Namun, negara pun cenderung ingin memaksimalkan keuntungan dari berbagai aspek untuk kepentingannya dengan konsekuensi yang berlaku<sup>17</sup>. Negara pun dinilai egois karena akan khawatir apabila negara lain lebih diuntungkan daripada negara lainnya, dan apabila suatu negara memiliki spesialisasi dalam suatu bidang maka negara tersebut cenderung untuk tidak akan bergantung terhadap barang yang tidak dimiliki negara tersebut walaupun negara tersebut membutuhkannya<sup>18</sup>. Selain itu, dalam suatu organisasi internasional yang memiliki *power*, negara tersebut akan memiliki keinginan untuk mengontrol organisasi tersebut, dan apabila organisasi internasional itu termasuk organisasi internasional yang lemah, maka negara tersebut cenderung untuk meninggalkan organisasi itu.<sup>19</sup>

Struktur atau sistem yang sudah berjalan di dunia Internasional pun sulit diubah walaupun setiap negara memiliki keinginan untuk mencapai keinginan mereka dengan menciptakan sistem yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar negara yaitu *self-help*, yang membuat negara lebih mengutamakan kepentingan dan keamanan negaranya tersebut dibandingkan dengan berkontribusi terhadap sistem yang ada. Karena, apabila setiap negara lebih mengutamakan sistem internasional maka *national*

---

<sup>17</sup> Kenneth N. Waltz (1979). Ibid. page 105.

<sup>18</sup> Kenneth N. Waltz (1979). Ibid. page 107.

<sup>19</sup> Kenneth N. Waltz (1979). Ibid. page 112.

*interest* mereka akan tersisihkan, yang berlawanan dengan fakta bahwa setiap negara akan mengutamakan dirinya sendiri dibandingkan berkontribusi terhadap sistem yang berlaku<sup>20</sup>. Dalam sistem politik, Kenneth N. Waltz menilai bahwa adanya perbedaan antara sistem politik internasional dan politik nasional, yang dimana sistem politik nasional bersifat hierarki, vertikal, terstruktur dan sistem politik internasional yang bersifat anarkis, horizontal, dan tidak terstruktur menyebabkan adanya *struggle for power* antar negara<sup>21</sup>.

Kenneth N. Waltz pun melihat bahwa apabila suatu negara memiliki *power* yang terlalu besar, maka negara lain akan menganggap negara tersebut ancaman dan akan berusaha untuk menyaingi negara tersebut untuk menjaga *balance of power*, dan negara akan melakukan tindakan dengan cara bekerja sama dengan negara lain atau meningkatkan kekuatan negara tersebut untuk mempunyai *power* yang seimbang. Selain itu, Kenneth N. Waltz pun menyimpulkan bahwa negara memiliki tindakan seminimalnya untuk menjaga dirinya sendiri dan apabila negara tersebut menemukan potensi dan *power* maka negara tersebut akan memiliki keinginan untuk mendominasi sistem yang berada di dunia internasional ini, dan untuk mencapai hal tersebut maka ada faktor internal seperti peningkatan ekonomi negara, peningkatan kekuatan militer, perancangan strategi dan adanya faktor external seperti penambahan aliansi untuk mengamankan negara tersebut atau melemahkan negara lain demi kepentingan negara

---

<sup>20</sup> Kenneth. N. Waltz. (1979). Ibid. page 109.

<sup>21</sup> Kenneth. N. Waltz. (1979). Ibid. page 113.

tersebut. Walaupun negara memiliki sistem *self-help*, akan tetapi negara akan melakukan aliansi apabila aliansi tersebut memberikan keuntungan bagi negara tersebut dan tidak memiliki negara lain yang lebih superior dan berusaha untuk mengendalikan negara lainnya dalam aliansi tersebut, aliansi memang terkadang diperlukan oleh suatu negara dan apabila negara melakukan segalanya sendiri maka negara tersebut tidak akan efektif dan cenderung akan gagal dalam melindungi keamanan negaranya.<sup>22</sup>

Negara pun memiliki sifat *bandwagoning* dan *balancing* yang terjadi apabila adanya perseteruan antar negara maka negara – negara lain cenderung hanya akan mengikuti pemenang untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan membangun koalisi untuk menjaga *prize of power* yang sudah ada. Dapat kita ketahui bahwa *bandwagoning* dan *balancing* adalah kedua hal yang berbeda, yang dimana dalam *bandwagoning* suatu aliansi, semua negara menginginkan adanya pemegang kekuasaan tertinggi agar terciptanya sistem meskipun ada negara yang tidak setuju tentang siapa yang memegang kekuasaan tersebut dan negara akan berusaha sekuat mungkin untuk memperebutkan pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan dalam *balancing* lebih mementingkan kemenangan dalam aliansi tersebut. Selain itu, dengan sistem internasional yang bersifat anarkis maka negara akan mementingkan tingkat *survivability* dari negara tersebut dibandingkan dengan *profit, power*. Oleh karena itu dalam sistem internasional ini apabila negara lebih menginginkan *power* dibandingkan

---

<sup>22</sup> Kenneth N. Waltz (1979). Ibid. page 117-118.

dengan *survivability* maka sistem internasional yang tercipta adalah sistem hegemony. Hal ini tidak terjadi, karena sistem yang berlaku adalah *balancing* dan bukan *bandwagoning*.<sup>23</sup>

Selain Kenneth N. Waltz, penulis pun menggunakan teori *offensive neorealism* yang dikembangkan oleh John J. Mearsheimer. *Offensive dan Defensive Neorealism* memiliki pandangan bahwa aktor utama dalam dunia internasional adalah negara yang memiliki power besar dan sistem yang berlaku adalah sistem anarki, negara tidak akan pernah tahu tujuan dari negara lain, setiap negara memiliki kapabilitas militer, keberlangsungan negara adalah tujuan utama dari negara dan setiap negara adalah aktor yang rasional<sup>24</sup>. Walaupun memiliki basis pemikiran yang sama, *offensive neorealism* memiliki pandangan yang berbeda pada sifat pada setiap negara. Negara cenderung akan memaksimalkan power negara tersebut dan melakukan *self – help* untuk dapat menjaga keberlangsungan negara tersebut dibandingkan menjaga *balance of power* yang sudah ada<sup>25</sup>. Mearsheimer pun memiliki pendapat bahwa setiap negara akan memiliki keinginan untuk berada di kondisi damai dengan cara menguasai seluruh dunia, apabila memungkinkan keberlangsungan hidup negara pun akan pasti dapat tercapai. Negara pun dinilai akan mencari kesempatan untuk menggoyahkan *balance of power* dengan mencuri keuntungan dari negara yang cenderung akan menjadi rival

---

<sup>23</sup> Kenneth N. Waltz (1979). Ibid. page 126.

<sup>24</sup> John J. Mearsheimer (2001). "The Tragedy of Great Power Politics". Page 30-31.

<sup>25</sup> John J. Mearsheimer (2001). Ibid. Page 21.

mereka dengan cara politik, militer, ataupun ekonomi. Walaupun hal tersebut akan membuat negara tersebut akan menjadi lawan mereka.<sup>26</sup>

Dengan adanya sifat negara yang cenderung akan mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan dengan mencuri kekuatan negara pesaingnya, maka negara memiliki tujuan utama untuk menjadi negara hegemon. Hal tersebut dilakukan karena adanya anarkis dalam sistem internasional, sehingga untuk dapat menjaga keamanan negara mereka secara maksimal, maka diperlukan lah power yang sangat kuat untuk menjadi hegemon<sup>27</sup>. Mearsheimer pun berpendapat bahwa negara – negara akan cenderung melewatkan peluangnya untuk menjadi hegemon apabila negara tersebut akan berperang dengan negara super power lainnya karena negara tersebut sudah cukup yakin untuk bias mempertahankan keberlangsungan negaranya.<sup>28</sup>

Negara superpower memiliki 4 tujuan utama. Pertama adalah *regional hegemony*, hal ini dilakukan karena untuk mendominasi dunia secara global adalah hal yang sulit dengan adanya keterbatasan dan adanya aturan serta hukuman bagi yang melakukan peperangan, oleh karena itu negara akan mendominasi kawasan regional mereka terlebih dahulu. Kedua adalah *Maximum Wealth*, negara superpower akan memiliki tujuan untuk memaksimalkan jumlah keuntungan yang bisa didapatkan dari apa yang mereka control. Ketiga adalah *preeminent land power*, negara superpower akan

---

<sup>26</sup> John J. Mearsheimer (2001). Ibid. Page 34.

<sup>27</sup> John J. Mearsheimer (2001). Ibid. Page 29.

<sup>28</sup> John J. Mearsheimer (2001). Ibid. Page 35.

berusaha untuk mendominasi *the balance of power*, karena hal tersebut adalah hal yang paling efektif untuk memaksimalkan potensi militer negara tersebut dan akan berusaha untuk mempunyai pasukan militer terkuat dalam dunia internasional ini. Keempat adalah *Nuclear Superiority*, negara superpower akan berambisi untuk memiliki nuklir agar dapat mempunyai kapabilitas untuk menghancurkan negara lawannya, serta adanya perbedaan kepemilikan nuklir dapat membedakan antara negara lemah dan negara superpower.<sup>29</sup>

Mearsheimer pun memiliki pendapat bahwa negara superpower tidak hanya menginginkan power yang melebihi negara lawannya, namun juga menghalangi negara lawannya untuk mendapatkan power yang lebih. Namun apabila terjadinya kondisi dimana negara superpower harus berhadapan dengan negara superpower lainnya, maka negara tersebut akan melakukan strategi *balancing* atau *buck – passing*<sup>30</sup>. Strategi *balancing* merupakan strategi negara superpower untuk melakukan tindakan langsung untuk menghadapi negara penyerang, *Balancing* pun memiliki 3 cara yang berbeda. Pertama, negara superpower melakukan adanya negosiasi untuk memberikan pesan kepada negara penyerang untuk berhenti melakukan serangan tersebut. Kedua, negara superpower melakukan aliansi dengan negara lain, sehingga negara penyerang akan merasa terancam apabila menyerang negara tersebut. Ketiga, negara superpower memindahkan militer ataupun perlengkapan mereka ke tempat yang strategis untuk

---

<sup>29</sup> John J. Mearsheimer (2001). Ibid. Page 40-45.

<sup>30</sup> John J. Mearsheimer (2001). Ibid. Page 155.



dapat membantu power yang berada di lokasi penambahan militer ataupun perlengkapan tersebut.<sup>31</sup>

*Buck – passing* adalah strategi yang dilakukan negara superpower dengan cara menggunakan negara lain untuk menanggung beban yang akan dihadapi oleh negara superpower untuk melawan negara penyerang. Namun untuk dapat menjalankan strategi tersebut, negara superpower harus dapat mengalihkan perhatian negara penyerang kepada negara yang akan dijadikan target untuk *buck – passing* dan negara superpower harus dapat menjaga hubungan dengan negara sasaran, hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan adanya kesenjangan diplomatis dan untuk tidak tertarik kedalam perang yang akan direncanakan oleh superpower.<sup>32</sup>

Glenn H. Syder pun berpendapat bahwa pada dalam suatu sistem internasional maka negara cenderung akan melakukan aliansi untuk dapat menghadapi suatu masalah. Setiap negara memiliki pilihan untuk membangun aliansi ataupun tidak mencari aliansi sama sekali. Namun apabila aliansi terjadi antar negara, negara – negara lain pun cenderung akan membentuk aliansi yang baru karena tidak yakin dengan aliansi yang dibuat berdasarkan tujuan defensif atau ofensif. Selain itu, Snyder pun menjelaskan bahwa dalam suatu aliansi ada dua hal yang mungkin terjadi, yaitu *cooperate* yang membangun aliansi atas dasar komitmen yang besar dan akan membantu aliansi mereka apabila terjadi suatu konflik dan *defect* adalah aliansi yang

---

<sup>31</sup> John J. Mearsheimer (2001). Ibid. Page 156.

<sup>32</sup> John J. Mearsheimer (2001). Ibid. Page 157.

dibangun dengan komitmen yang rendah dan tidak akan membantu aliansi mereka apabila terjadi konflik.<sup>33</sup>

Snyder pun berpendapat apabila suatu aliansi mengalami *defect*, maka negara tersebut akan cenderung mengalami *abandonment* atau *entrapment*. *Entrapment* adalah aksi suatu negara yang terbawa ke dalam suatu konflik dari negara aliansinya, sedangkan seharusnya negara tersebut tidak memiliki isu apapun dengan negara lawannya. *Abandonment* adalah disaat suatu negara hanya bisa bergantung kepada negara aliansinya dan negara aliansinya tidak memiliki komitmen yang sama besar, sehingga negara tersebut akan meninggalkan negara aliansinya tersebut tanpa adanya bantuan apapun. Selain itu, semakin kuat suatu negara akan bergantung kepada suatu aliansi dan semakin kuat komitmen negara tersebut, maka kemungkinan negara tersebut akan terkena *entrapment* pun semakin besar. Oleh karena itu, komitmen yang kuat pada suatu aliansi haruslah sesuai dengan adanya ancaman yang akan mengancam negara – negara yang berada di aliansi tersebut.<sup>34</sup> Dengan penggunaan teori dari Kenneth N. Waltz, John J. Mearsheimer dan Glenn H. Snyder, Penulis akan mengidentifikasi dan menggunakan teori tersebut untuk bisa membantu penulis dalam fokus penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Glenn H. Snyder (1984). "The Security Dilemma in Alliance Politics". Page 466

<sup>34</sup> Glenn H. Snyder (1984). Ibid. Page 467

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode kualitatif yang melibatkan penilaian penulis akan hubungan dari teori dan data, serta dari hasil pengamatan peneliti terhadap buku, jurnal, artikel serta informasi-informasi yang terkait dengan topik yang akan dikaji.<sup>35</sup>

Penelitian ini akan menggambarkan masalah, kemudian penulis akan menganalisa permasalahan dengan penggunaan landasan teori dan konsep untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat.

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi literatur. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data – data yang berkaitan dengan langkah - langkah Jepang untuk menghadapi ancaman misil Korea Utara, BMD (*Ballistic Missile Defence*), kebijakan Jepang dan juga adanya ketergantungan Jepang terhadap Amerika dalam bentuk data kualitatif. Data yang digunakan oleh penulis diperoleh dari sumber – sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan internet.

## **1.7. Sistematika Penulisan**

Pada Bab I, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian yang dilanjutkan dengan identifikasi masala, serta pembatasan masalah. Setelah itu, penulis

---

<sup>35</sup> Alan Bryman, “*Social Research Methods, The Nature of Qualitative Research*” Page 380.

akan menggunakan kerangka pemikiran yang berisi teori – teori dan konsep *neorealism* yang dianggap relevan dalam membahas permasalahan yang ada. Penulis juga memaparkan kajian literatur yang digunakan serta tujuan dan kegunaan dari penulisan ini.

Bab II menjelaskan tentang mengenai keadaan dan langkah yang diambil Jepang untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara yang dimulai dari tahun 1998 dan berlanjut hingga tahun 2012 hingga 2018.

Bab III menjelaskan tentang analisa dari penulis mengenai bagaimana langkah yang diambil Jepang untuk mengatasi ancaman Korea Utara serta dilema aliansi Jepang dengan Amerika Serikat.

Bab IV merupakan penutup dari seluruh pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya, serta adanya kesimpulan dari penulisan yang dilakukan.